

**PEMIKIRAN KH. ACHMAD SIDDIQ TENTANG
TAJDIR DAN PANCASILA (1947-1991)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Agama**

Oleh:

**SYAMSUL ARIFIN
NIM: 9712 2013**

**JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

Sejak Indonesia di proklamirkan menjadi Negara yang merdeka maka beberapa permasalahan muncul , mulai dari pengakuan dunia Internasional , masalah bentuk dan dasar Negara, Dalam perkembangan selanjutnya bangsa Indonesia telah beberapa kali menerapkan system undang-undang dasar, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang paling mendasar. Dekrit presiden 5 Juli 1959 merupakan upaya pemerintah untuk membakukan system undang-undang dengan memberlakukan kembali UUD 1945. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga muncul penafsiran yang berbeda-beda tentang Pancasila dan hal ini tentunya membawa dampak yang buruk dan mengakibatkan labilnya penafsiran terhadap dasar Negara.

Kepemimpinan Soeharto yang selama ini di kenal sebagai kepemimpinan rezim pada tahun 1980 an melontarkan gagasan tentang Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga memicu kontroversi antara masyarakat dengan pemerintah. KH. Achmad Siddiq adalah seorang ulama yang memiliki latar belakang NU dan mempunyai pandangan moderat, dalam Munas NU 1983 di Situbondo mendapatkan tugas dari para ulama besar NU untuk mempelajari konsep penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Sebagai upaya yang dilakukan KH. Achmad Siddiq dalam menyelesaikan permasalahan asas organisasi tersebut digunakan metode-metode agama (tajdid dan ijtihad) yang selama ini hanya dipakai sebagai alat pemecah persoalan agama dengan metode-metode modern, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama.

Kajian ini merupakan kajian sejarah, sehingga yang digunakan adalah metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis atas rekaman dan peninggalan terhadap peristiwa masa lampau, dan kajian ini adalah kajian tokoh, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan biografis yaitu berusaha menjelaskan dengan teliti kenyataan hidup KH. Achmad Siddiq, pengaruh yang diterima serta sifat dan pemikiran yang dimiliki dalam masa formatif kehidupannya. Selain itu juga menggunakan pendekatan antropologis di mana pendekatan yang berusaha mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seorang tokoh, status dan system kepercayaan yang mendasari pola kehidupannya.

Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum.

Dosen Fakultas Adab

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Syamsul Arifin

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas adab

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syamsul Arifin

NIM : 9712 2013

Fak / Jur : Adab / Sejarah dan Peradaban Islam

Judul : "Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Tajdid dan Pancasila (1947-1991)"

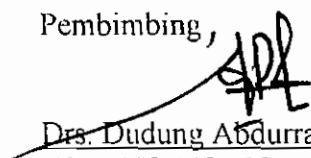
Telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Adab dalam jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Untuk itu kami mengharap dalam waktu dekat skripsi yang bersangkutan dapat dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2002

Pembimbing,


Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum.

NIP : 150 240 122



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telpun (0274) 513949

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Tajdid dan Pancasila (1947 – 1991)**
Diajukan oleh :

1. Nama : SYAMSUL ARIFIN
2. NIM : 97122013
3. Program : Sarjana Strata I
4. Jurusan : SPI

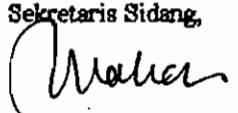
telah dirumahnya syahkan pada hari : Rabu tanggal 27 Maret 2002 dengan nilai : B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Panitia Ujian Munaqsayah


Ketua Sidang,


Drs. Duding Abdurrahman, M.Hum
NIP. 150240122

Sekretaris Sidang,


Maharsi, M.Hum
NIP. 150299965


Pembimbing/Merangkap Penguji,


Drs. Duding Abdurrahman, M.Hum
NIP. 150231517

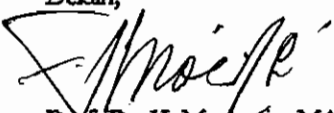
Penguj I,


Drs. H. Jahdan Ibnu HS, M.S
NIP. 150202281

Pengujii II,


Drs. Badrun Alaena, M.Si
NIP. 150253322

Yogyakarta, 4 April 2002
Dekan,


Prof. Dr. H. Maghasin, MA
NIP. 150201334

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk;

Ayah dan Ibunda tercinta

Adik-adikku

Dan Adinda...





SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 150/1987 dan Nomor: 05936/U/1987

I. Konsonan Tunggal





Arab	Latin	Latin	Latin
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

I. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	
	ditulis	


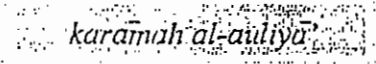
II. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

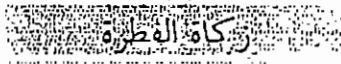
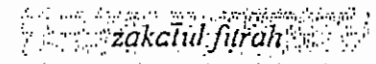
	ditulis	
	ditulis	

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

	ditulis	
---	---------	---


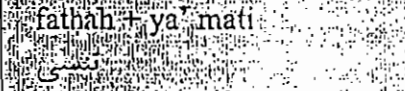
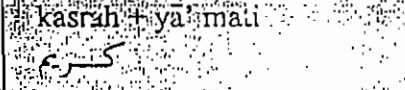
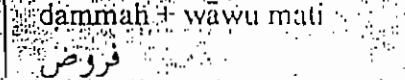
- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	ditulis	
---	---------	---

V. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif 	ditulis	a
2	fathah + ya mati 	ditulis	jahiliyyah a
3	kasrah + ya mati 	ditulis	tansa i
4	dammah + wawu mati 	ditulis	karim u furud

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي فضل بنى ادم بالعلم على جميع العالم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير الانام والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى
آله واصحابه اجمعين .

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai batas akhir zaman.

Bagi penyusun, skripsi ini merupakan titik akhir dari proses panjang dalam menuntut ilmu di IAIN Sunan Kalijaga. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara materi ataupun imateri. Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya bila penyusun sangat berterimakasih sekali kepada pihak-pihak tersebut. Terimakasih tak terhingga ini kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Adab.
3. Bapak Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum. selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Satiri selaku staf pegawai perpustakaan Lakpesdam Jakarta yang telah membantu dalam pengumpulan bahan.
5. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A. selaku pembimbing akademik serta seluruh staf pengajar dan staf karyawan fakultas adab.

6. Bapak kalian Ibu, Si mbah Putri dan Kakung, Adik-adikku dan Dindaku *Biuti mastiroli*, yang selalu memberikan bimbingan, do`a, dorongan moral maupun material yang tak ternilai, serta kasih sayang dan kesabaran yang tulus hingga selesainya skripsi ini.
7. Sobat-sobatku seperjuangan dalam fakultas, sedulurku gank AMPT, serta seluruh temen-temen yang telah rela memberikan ruang dalam hatinya tuk mengenalku.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun hanya bisa berdo`a semoga apa yang telah diperbuatnya menjadi amal ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan masukan yang konstruktif dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. *Amin*

Yogyakarta, 21 Maret 2002

Penyusun

Syamsul Arifin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 01
B.	Identifikasi Masalah 05
C.	Batasan dan Rumusan Masalah 06
D.	Tujuan dan Kegunaan 06
E.	Tinjauan Pustaka 07
F.	Metode Penelitian 09
G.	Sistematika Penelitian 11
BAB II	PERKEMBANGAN PEMIKIRAN AGAMA DAN POLITIK AWAL KEMERDEKAAN DI INDONESIA
A.	Perkembangan Pemikiran Keagamaan 13
B.	Perkembangan Pemikiran Politik 16

BAB III	BIOGRAFI KH. ACHMAD SIDDIQ	
	A. Latar Belakang Keluarga	23
	B. Latar Belakang Pendidikan.....	28
	C. Karier.....	30
	D. Karya-karya	33
BAB IV	PEMIKIRAN KH. ACHMAD SIDDIQ TENTANG <i>TAJIDID</i> (PEMBAHARUAN) DAN PANCASILA	
	A. Tajdid	36
	1. Ijtihad	42
	2. Pembaharuan Tasawuf	46
	B. Pancasila	52
	1. Hubungan Agama dan Pancasila	56
	2. Negara RI bentuk final	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi catatan sejarah, bahwa sejak bangsa Indonesia diproklamlirkan menjadi negara merdeka diwarnai oleh beberapa permasalahan, mulai dari langkah pemerintah untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi bangsa Indonesia terhadap dunia internasional sampai kepada masalah-masalah mendasar, seperti bentuk negara dan dasar negara. Dalam perkembangan selanjutnya bangsa Indonesia telah beberapa kali menerapkan sistem Undang-undang Dasar.¹ Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus cepat menyelesaikan permasalahan yang paling mendasar bagi negara. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan upaya pemerintah untuk membakukan sistem undang-undang dengan memberlakukan kembali UUD 1945.²

Pada kenyataannya, upaya-upaya yang diambil pemerintah untuk membakukan UUD 1945 tetap tidak mampu untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pancasila telah membawa dampak yang buruk dan mengakibatkan labilnya penafsiran terhadap dasar negara.

¹ Endang Saefuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. XIX.

² *Ibid*, hlm. 244. Lihat juga, Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 129.

Munculnya organisasi politik dengan mamakai landasan dan ideologi masing-masing, semakin mengaburkan dan menambah rumitnya penafsiran terhadap Pancasila. Gerakan PKI yang dikenal G-30 S-PKI tahun 1965, merupakan bukti kongret adanya penyelewengan penafsiran terhadap Pancasila, sehingga dasar negara menjadi suatu permasalahan negara yang harus diselesaikan dengan cepat. Pancasila dari masa ke masa telah menjadi permasalahan negara yang tak kunjung berakhir bahkan sampai periode tahun 1980-an. Periode tahun 1980-an merupakan periode pergantian pemerintahan dari orde lama menuju orde baru, dan tentunya membawa kebijakan-kebijakan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Kepemimpinan Soeharto yang selama ini dikenal sebagai kepemimpinan rezim, pada periode 1980-an melontarkan suatu gagasan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal dalam sebuah pidato kenegaraan 16 Agustus 1982.³ Gagasan tersebut merupakan bentuk tantangan besar bagi bangsa Indonesia terutama bagi organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan. Selain itu gagasan tersebut juga memicu kontroversi antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Satu sisi pemerintah menghendaki adanya penyatuan ideologi bersama, di pihak lain (organisasi politik dan kemasyarakatan) menghendaki adanya kebebasan sesuai dengan dasar ideologi masing-masing.

³ Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm. 233-235.

NU sebagai basis organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, melihat kebijakan yang dilontarkan pemerintah orde baru jelas sangat bertentangan dengan ideologi organisasi yang selama ini dianut. Sebagai organisasi keagamaan NU melihat kebijakan pemerintah tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dipecahkan bersama. Melihat fenomena ini NU yang selama ini lebih menangani permasalahan keagamaan harus mengubah pola berfikir mereka dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Munculnya tokoh NU yang berlatar belakang tradisional dan mempunyai pemikiran moderat bahkan kadang-kadang pemikirannya dinilai radikal oleh kalangan NU sendiri, merupakan angin segar bagi penyelesaian permasalahan negara. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah KH. Achmad Siddiq.

KH. Achmad Siddiq sebagai seorang ulama yang memiliki latar belakang NU dan mempunyai pandangan moderat, dalam Munas NU 1983 di Situbondo, mendapatkan tugas dari para ulama besar NU untuk mempelajari konsep penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.⁴ Pemikiran yang diajukan oleh KH. Achmad Siddiq ini menimbulkan kegalauan bagi umat Islam khususnya warga NU, akankah asas Islam akan diganti oleh asas Pancasila?

Sebagai upaya yang dilakukan oleh KH. Achmad Siddiq dalam menyelesaikan permasalahan asas organisasi tersebut digunakan metode-metode

⁴ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 163-164.

agama (*tajdīd* dan *ijtihād*) yang selama ini hanya dipakai sebagai alat pemecah persoalan agama dengan metode-metode modern, sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan bersama. Untuk memperkuat argumentasi KH. Achmad Siddiq terhadap penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, maka Pancasila sebagai dasar negara dianalogikan dengan Piagam Madinah, yaitu suatu piagam yang berisi kesepakatan bersama antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai golongan non muslim di Madinah.⁵ Dengan menggunakan kerangka berfikir tradisional-moderat tersebut, maka KH. Achmad Siddiq berupaya memecahkan berbagai persoalan keagamaan maupun persoalan politik yang sedang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia.

Semasa hidupnya KH Achmad Siddiq pernah aktif dalam Departemen Agama, anggota DPR RI serta anggota BPPN (1989-1992)⁶ merupakan suatu bukti bahwa selain merupakan tokoh Islam, ia juga salah satu tokoh nasional.

Hadirnya KH. Achmad Siddiq sebagai tokoh yang berlatarbelakang tradisional sangat wajar apabila dalam menghadapi permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat selalu menggunakan sudut pandang agama. Selain itu KH. Achmad Siddiq juga memakai cara berfikir moderat. Hal itu tidak terlepas dari posisinya sebagai pemimpin Syuriah PBNU, sehingga

⁵ Sudirman Tebba dan Max Margono, "Lebih Jauh Dengan KH. Achmad Siddiq", *Kompas* (Jakarta) , 31 Januari 1987.

⁶ "Dari Pesantren Sampai Presiden", *Jawa Pos*, (Surabaya), 24 Januari 1991.

tokoh-tokoh dari tubuh NU sendiri seringkali menganggap bahwa pemikiran KH. Achmad Siddiq dalam menghadapi permasalahan dinilai agak radikal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbul suatu keinginan penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran KH. Achmad Siddiq dalam bidang pembaharuan dan Pancasila dengan mengambil judul penelitian “Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang *Tajdīd* dan Pancasila (1947-1991)”.

B. Identifikasi Masalah

KH. Achmad Siddiq merupakan figur ulama tradisional yang dikenal di kalangan pesantren khususnya di wilayah Jember Jawa Timur. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai tokoh nasional yang bergelut dengan dunia politik. Sebagai ulama sekaligus politikus, KH. Achmad Siddiq banyak melahirkan ide-ide pemikiran di bidang agama, sosial budaya maupun politik.

KH. Achmad Siddiq dilahirkan di Jember pada tanggal 24 Januari 1926, ia telah banyak mengenyam berbagai perubahan masa mulai dari zaman penjajahan sampai masa kemerdekaan. Setelah tamat sekolah dasar (SD) ia melanjutkan pendidikan di lingkungan pesantren. Ia dikirim oleh orang tuanya belajar ke pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan KH. Wahid Hasyim. Kondisi pendidikan, sosial agama dan sosial politik pada masanya, sedikit banyak telah membentuk dirinya menjadi seorang ulama sekaligus pemikir (intelektual).

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi pada pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang *tajdid* dan Pancasila dalam kurun waktu 1947-1991, yang merupakan masa aktifnya KH. Achmad Siddiq dalam dunia organisasi dan politik. Pembahasannya meliputi riwayat hidup, perkembangan pemikiran agama dan politik (negara) di Indonesia yang merupakan faktor pendorong bagi lahirnya pemikiran-pemikirannya. Batasan akhir penelitian ini akan mengungkap pemikiran KH. Achmad Siddiq khususnya tentang *tajdid* (pembaharuan) dan Pancasila.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka permasalahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perkembangan agama dan politik di Indonesia yang mempengaruhi terhadap pola pemikiran KH. Achmad Siddiq?
2. Siapa dan bagaimanakah latar belakang kehidupan KH. Achmad Siddiq?
3. Bagaimana pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang *tajdid* dan Pancasila?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum sejarah dipergunakan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau umat manusia.⁷ Demikian juga dengan penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali peristiwa masa lampau, yaitu hasil-hasil pemikiran KH. Achmad Siddiq dalam bidang agama dan politik (negara). KH. Achmad Siddiq yang *notabene* ulama tradisional pesantren tentunya menjadi

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 17.

suatu hal yang sangat langka ketika melahirkan pemikiran di bidang politik kenegaraan, sehingga lebih jauh lagi penelitian ini bermaksud mengungkap dan menelusuri pemikiran-pemikirannya.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Memberikan deskripsi yang jelas tentang biografi serta pemikiran-pemikiran KH. Achmad Siddiq.
2. Untuk menambah dan memperkaya khasanah kepustakaan Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan sejarah tokoh dan pemikiran.
3. Untuk menambah informasi serta sebagai bahan perbandingan terutama bagi mereka yang berminat meneliti lebih lanjut tentang kajian tokoh dan pemikirannya.

E. Tinjauan Pustaka

KH. Achmad Siddiq merupakan sosok ulama pesantren tradisional, sekaligus dikenal sebagai figur tokoh politik berlevel nasional. Figur inilah yang langka dimiliki oleh tokoh ulama pesantren lain.

Semasa hidupnya Kiai Achmad banyak berkiprah dan aktif dalam organisasi NU, dari sinilah akhirnya Kiai Achmad dikenal sebagai ulama yang aktif dan produktif menghasilkan pemikiran-pemikiran politik, namun kajian-kajian terhadap pemikiran-pemikiran Kiai Achmad bisa dibilang masih sedikit. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini ada beberapa buku dan skripsi yang berkenaan dengan KH. Achmad Siddiq, antara lain:

Buku berjudul "*Biografi Lima Rais 'Am Nahallatul Ulama*". Buku ini merupakan kumpulan beberapa makalah yang diedit oleh Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS. Buku ini mengkaji sekilas biografi lima tokoh di antaranya yaitu: KH. Hasyim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Ali Ma'shum dan KH. Achmad Siddiq. Dalam bahasan tentang KH. Achmad Siddiq dijelaskan berbagai aspek pemikiran agama dan politik secara singkat, sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang pembaharuan (*tajdīd*) dan pemikiran tentang Pancasila.

Skripsi karya Muawiyah, mahasiswa Universitas Negeri Jember 1996, berjudul "*Kontribusi Pemikiran KH. Achmad Siddiq Dalam Menghadapi Polarisasi Politik NU (1984-1991)*". Skripsi ini menguraikan tentang kontribusi pemikiran KH. Achmad Siddiq dalam NU, yaitu tentang kembalinya khittah NU 1926. Kemudian juga dijelaskan konflik antara kiai dan politik, prilaku politik NU setelah kembali ke khittah 1926, hubungan NU dan Asas Tunggal, hubungan NU dan pemilu 1987 serta membahas perkembangan NU paska muktamar 1989-1991. Di sinilah letak perbedaan dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada pembahasan pemikiran KH. Achmad Siddiq dalam bidang pembaharuan (*tajdīd*) dan Pancasila.

Skripsi karya Aceng, mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, berjudul "*Sumbangan pemikiran Kiai Haji Achmad Siddiq Terhadap Organisasi NU*". Dalam skripsinya Aceng lebih memfokuskan kajian terhadap eksistensi KH. Achmad Siddiq dalam struktur kepemimpinan NU, Kebijakan-

kebijakan KH. Achmad Siddiq selama duduk dalam kepengurusan NU serta kiprah KH. Achmad Siddiq dalam organisasi NU. Dari sini terlihat perbedaan antara skripsi Aceng lebih berorientasi pada bahasan kiprah KH. Achmad Siddiq dalam organisasi NU, sedang penelitian ini lebih membahas pada pemikiran KH. Achmad Siddiq dalam bidang pembaharuan (*tajdid*) dan Pancasila.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian terhadap sejarah, oleh sebab itu metode yang dipakai adalah metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis atas rekaman dan peninggalan terhadap peristiwa masa lampau.⁸ Menurut G.J. Garaghan yang dikutip oleh T. Ibrahim Alfian, metode historis ialah seperangkat aturan atau prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilai secara kritis dan menyajikan sintesa dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.⁹ Metode ini menurut Nugroho Notosusanto¹⁰ meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik yaitu proses pengumpulan data yang berkaitan dengan topik.

Dalam hal ini akan ditempuh teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan KH. Achmad Siddiq, baik itu biografi ataupun

⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 32.

⁹ Imam Bernadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan. IKIP, 1982), hlm. 35.

¹⁰ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hlm. 35.

pemikiran-pemikirannya serta ditambah dengan data lain yang berkaitan dengan permasalahan atau topik.

2. Verifikasi atau kritik sumber.

Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh keabsahan sumber, dengan cara menguji tentang keaslian sumber (*otentitas*) melalui kritik ekstern dan kesahihan sumber (*kredibilitas*) melalui kritik intern.¹¹

3. Interpretasi atau penafsiran terhadap data yang telah diuji.

Dalam hal ini akan dilakukan *analisis* dan *sintesis* (menguraikan dan menyatukan)¹² terhadap data yang telah teruji, sehingga membentuk suatu pemahaman baru. Jalaluddin memakai cara “Content Analysis” dalam menganalisa data tertulis yang berupa isi komunikasi. Isi komunikasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep, pendapat, teori-teori maupun prinsip-prinsip dan pemikiran Kiai Achmad Siddiq yang terdapat dalam buku, maupun sumber-sumber lain.¹³

4. Historiografi atau tahap penulisan.

Historiografi merupakan tahap terakhir dari penelitian. Dalam historiografi ini mencakup aspek cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metode penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58-59.

¹² Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Methodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 44.

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 122.

Penelitian ini merupakan kajian tokoh, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan biografis yaitu berusaha menjelaskan dengan teliti kenyataan hidup KH. Achmad Siddiq, pengaruh yang diterima serta sifat dan pemikiran yang dimilikinya dalam masa formatif kehidupannya.¹⁴ Selain pendekatan biografis, penelitian ini juga memakai pendekatan antropologis, yaitu pendekatan yang berusaha mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seorang tokoh, status dan sistem kepercayaan yang mendasari pola kehidupan KH. Achmad Siddiq.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian dalam bentuk skripsi ini mempunyai tiga bagian yaitu : pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, di dalamnya menguraikan beberapa hal pokok mengenai penelitian ini yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara umum.

Kemudian hasil penelitian ini tersusun dalam tiga bab berikutnya, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan antara bab satu dengan yang lainnya. Pada bab kedua, dipaparkan pokok pembahasan tentang

¹⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 137.

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 77.

perkembangan pemikiran agama dan politik Indonesia dalam awal kemerdekaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana perkembangan pemikiran keagamaan dan kenegaraan di Indonesia yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pola pemikiran KH. Achmad Siddiq.

Bab ketiga, membahas tentang biografi KH. Achmad Siddiq meliputi: latarbelakang keluarga, latarbelakang pendidikan, karier dan karya-karyanya. Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui latarbelakang dan jati diri KH. Achmad Siddiq.

Bab keempat, menguraikan tentang pemikiran KH. Achmad Siddiq, meliputi dua bidang yaitu: bidang pembaharuan (*tajdīd*) dan Pancasila. Bidang *tajdīd* akan dikategorikan ke dalam dua sub bab bahasan, yaitu: *ijtihād*, pembaharuan *tasawuf*. Sedangkan bahasan Pancasila dibagi menjadi dua sub bahasan yaitu: Hubungan agama dan Pancasila serta Negara RI bentuk final. Bab keempat ini merupakan bahasan terhadap permasalahan pokok penelitian, yakni pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang *tajdīd* dan Pancasila.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti diikuti dengan saran dan kritik yang bersifat membangun dengan bertitik tolak pada kesimpulan.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KEAGAMAAN DAN KENEGARAAN AWAL KEMERDEKAAN DI INDONESIA

A. Perkembangan Pemikiran Keagamaan

Perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia secara historis tidak dapat terlepas dari pengaruh dua organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama mewakili organisasi yang selama ini dikenal sebagai organisasi tradisional, sedangkan Muhammadiyah mewakili organisasi modern di Indonesia. Sebagai organisasi-organisasi yang memiliki latarbelakang berbeda (tradisional-modern), tidak mengherankan jika dalam masa perkembangan keduanya selalu dihadapkan kepada perselisihan pendapat yang lebih mengarah kepada hal-hal *khilāfiyyah-furū'iyah* ajaran agama.

Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi *tajdīd* (pembaharu)¹ selalu menggalakkan arti pentingnya *tajdīd* dan *ijtihād* yang merujuk kepada sumber pokok al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ. Sementara NU sebagai organisasi yang berhaluan *Ahlu as-sunnah wa al-Jamā'ah* menanggapi permasalahan *tajdīd* dan *ijtiḥad* mengacu kepada kitab-kitab salaf yang dihasilkan ulama masa lalu (ulama *maḏhab*) dengan tanpa mengabaikan sumber pokok al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ, sehingga mucullah istilah *taqlīd*. *Taqlīd* selama ini banyak dipahami sebagai sesuatu yang ekstrim yang menimbulkan kebekuan terhadap pola pikir,

¹ Nurhadi M. Musawir (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. V-VII.

sehingga menghambat adanya *ijtihad*. NU memahami *taqlid* bukan sebagai suatu hal yang ekstrim atau sesuatu yang harus ditinggalkan, *taqlid* juga bukan berarti bersikap buta dan menyatakan bahwa “pintu *ijtihad* telah tertutup”,² tetapi *taqlid* lebih dipahami sebagai metode dalam pengambilan suatu hukum (*istinbath*) dengan memperhatikan hasil *ijtihad* ulama terdahulu (*maḥab*) dan juga memperhatikan terhadap sumber pokok al-Qur’an dan al-Ḥadīṣ. *Taqlid* ini lebih berfungsi bagi umat yang awam yang membutuhkan dan tidak mampu dalam melakukan *ijtihad* sendiri karena belum cukupnya syarat menjadi *mujtahid* atau *mujaḥhid*.

Tajdid dan *ijtihad* tidaklah semata mengarah terhadap permasalahan-permasalahan agama saja. Di tengah gejolak perkembangan bangsa Indonesia terutama masa-masa kemerdekaan *tajdid* dan *ijtihad* sangat diperlukan sekali guna memecahkan persoalan-persoalan negara. Persoalan riil yang dihadapi bangsa Indonesia dan berkait erat dengan permasalahan masyarakat khususnya umat Islam adalah Pancasila. Permasalahan ini dari waktu ke waktu terus mengalami kontroversi penafsiran yang tidak ada habis-habisnya, di sinilah konsep *tajdid* dan *ijtihad* sangat diperlukan.

Sebagai contoh lembaga yang bertugas menetapkan hukum suatu hal serta masalah-masalah keagamaan (Islam) di Indonesia dibentuk MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang diprakarsai oleh para ulama yang beranggotakan orang-

² Badruddin H Subky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 82.

orang yang dianggap paling memenuhi kapasitas untuk menetapkan hukum sesuatu masalah yang muncul dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan *tajdīd* dan *ijtihād*, tasawuf merupakan suatu ciri dan simbol tersendiri bagi Islam bahkan di Indonesiapun juga demikian. Perkembangan tasawuf di Indonesia selalu diidentikkan dengan *tarekat*. Tarekat berasal dari kata *thariqah*. Tarekat di sini lebih condong sebagai pengorganisasian atau pelembagaan terhadap tasawuf.

Bangsa Indonesia mempunyai latar belakang masyarakat yang plural, baik agama maupun kepercayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tarekat yang ada. *Tarekat* di Indonesia seringkali dimuati oleh tradisi dan budaya masyarakat,³ selain itu filsafat Hinduisme dan Budhisme turut mewarnai tarekat yang ada di Indonesia,⁴ sehingga tidak jarang tarekat yang ada tersebut telah keluar dari ajaran Islam yang semestinya.

Perkembangan tarekat akhir-akhir ini dianggap lebih merupakan bentuk-bentuk ritus keagamaan yang dipakai sebagai media pelarian terhadap suatu masalah, tetapi bukan berarti keseluruhan tarekat yang ada di Indonesia demikian. Gejala tarekat yang demikian tentunya akan memberi dampak yang kurang baik bagi tarekat dan akan mengurangi nilai-nilai pelaku tarekat.

³ Achmad Jainuri, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Islam*, Dalam M. Din Syamsuddin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 36-37.

⁴ Abdul Halim Soebahar, *Arsitek Pemukiman Islam Indonesia; Catatan Biografi KH. Achmad Siddiq*. (Jember: Juli 2001), hlm. 65.

B. Perkembangan Pemikiran Politik

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran politik di Indonesia, terdapat persoalan yang mendasar yang selalu menjadi topik perbedaan pendapat, yaitu Pancasila. Sejak awal proses pembentukan bangsa Indonesia sampai dekade 1980-an, Pancasila menjadi bahasan permasalahan negara yang tak ada habis-habisnya. Dinamika perkembangan pemikiran dasar negara ini dimulai sejak BPUPKI sebagai badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan, menunjuk panitia sembilan untuk merumuskan dasar negara, kemudian lahirlah Piagam Jakarta 22 Juni 1945.⁵ Proses menuju kesepakatan dalam merumuskan dasar negara mengalami perdebatan yang sengit antara dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler.

Walaupun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, tetapi pada 18 Agustus 1945 mengalami perubahan, yaitu pada sila pertama dengan menghapus tujuh kata "...dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya". Kemudian disempurnakan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Perkembangan pemikiran dasar negara pada periode pasca kemerdekaan, selanjutnya dihadapkan pada permasalahan penjajah (sekutu) saat itu yang tidak mengakui eksistensi Negara RI. Kemudian pemerintah

⁵ Tim Penyempurna Bahan Penataran P-4, *Bahan Penataran P-4, Pancasila P-4*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1996), hlm. 14.

⁶ Endang Saefuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta:Gema Insani Pres, 1997), hlm. XV.

mengambil langkah yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Negara RI, yaitu dengan dikeluarkannya maklumat politik pada 1 November 1945. Untuk mendukung maklumat tersebut, pemerintah juga mengeluarkan maklumat kedua pada tanggal 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian organisasi politik yang saat itu didasarkan pada ideologi golongan, sehingga pada akhirnya terjadi berbagai penafsiran terhadap Pancasila menurut pandangan masing-masing golongan.

* Pengalaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam periode tersebut menimbulkan benturan dan pergolakan yang sangat mengganggu terhadap stabilitas kehidupan nasional, penafsiran terhadap Pancasila telah semakin jauh dari konsensus para pendiri bangsa.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara mengalami pasang surut. Dalam melewati pasang surut tersebut bangsa Indonesia pernah memberlakukan tiga kali undang-undang dasar, Yaitu: UUD 1945, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), dan UUD Sementara 1950.⁷

Langkah pemerintah selanjutnya dalam mempersiapkan undang-undang dasar yang tetap, pada tahun 1955 diadakan pemilu yang pertama, kemudian berhasil membentuk konstituante 1956 yang bertujuan menentukan dasar negara yang baku. Pembicaraan mengenai dasar negara dalam konstituante tersebut seakan-akan merupakan pengulangan pembahasan serupa yang pernah

⁷ *Ibid*, hlm. XIX.

dialami oleh BPUPKI pada masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesan masalah dasar negara sudah selesai disepakati pada 18 Agustus 1945, tetapi yang terjadi sebaliknya suasana sidang seakan hendak membentuk negara baru lagi.

Pada dasarnya konstituante ini berhasil merumuskan kesepakatan mengenai hak asasi manusia dan beberapa masalah lain, tetapi ketika membahas dasar negara tetap mengalami perdebatan. Kemudian dilakukan pemungutan suara dan hasilnya seimbang, padahal untuk menetapkan suatu hal yang prinsipil (dasar negara) harus memenuhi persyaratan 2/3 dari jumlah suara yang hadir, baru dianggap sah.⁸ Oleh karena masing-masing kelompok tidak ada kompromi, maka terjadilah kemacetan dalam pengambilan keputusan.

Pengalaman politik yang mewarnai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sampai tahun 1956, mengilhami pemerintah (presiden) untuk mengeluarkan dekrit, yaitu dekrit presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia pertama, saat itu menyatakan dengan kata-kata:

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang:

- a. Menyatakan (dengan konsiderannya) bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kasatuan dengan konstitusi tersebut;

⁸ *Ibid*, hlm. 244.

- b. Menyatakan (dalam diktumnya) menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara”⁹

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, telah membawa bangsa Indonesia mengarungi babak baru, periode terpimpin yang berjalan selama kurun waktu 1959-1965. Seyogyanya sejak dikeluarkannya dekrit Pancasila dapat dihayati dan diamalkan, tetapi justru selama periode 1959-1965 terjadi lagi penafsiran baru terhadap Pancasila yang tentunya sangat menyimpang dari konsensus nasional 18 Agustus 1945. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat itu bersumber dari konsep Nasakom yang dicanangkan oleh presiden Soekarno, kemudian dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI menafsirkan Pancasila sebagai *marxisme*, Pancasila dipandang sekedar sebagai alat pemersatu, yang berarti bahwa setelah persatuan telah tercapai maka Pancasila tidak diperlukan lagi.¹⁰

Pandangan yang demikian jelas tidak sesuai dengan konsensus bangsa ketika pertama kali Pancasila disepakati. Tantangan terbesar menjelang tahun 1966 sebagai puncak gerakan anti Pancasila adalah pemberontakan PKI yang dikenal dengan G 30 S- PKI.

Perbedaan penafsiran terhadap Pancasila yang keliru juga terjadi di kalangan Islam sendiri. Kelompok Islam yang fanatis menganggap bahwa Pancasila hanyalah sila pertama saja sehingga mereka menganggap bahwa sila

⁹ *Ibid*, hlm. 244. Lihat juga, Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 129.

¹⁰ Tim Penyempurna Bahan Penataran P-4, *Bahan Penataran P-4 Pancasila*, hlm.28.

pertama identik dengan agama. Pandangan keagamaan semacam inilah yang dapat membawa pada pandangan *teokrasi* yang lebih mengesampingkan kelompok-kelompok lain.

Sementara itu memasuki masa orde baru, dinamika politik umat Islam mengalami ketegangan dan kontroversi, kaum muslim lebih ditempatkan pada posisi *marginal*. Sementara kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu banyak yang tidak mengakomodasikan aspirasi kaum muslimin.¹¹

Persoalan politik yang paling mendasar saat itu adalah posisi umat Islam yang selalu dipojokan sebagai golongan “anti Pancasila”, padahal kalau dilihat dari isi Pancasila sendiri tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam ikut dalam perumusan Pancasila.¹² Keadaan semacam ini telah membawa dampak dan beban psikologis bagi umat Islam.

NU sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia, dalam sejarah perjalanan politiknya, pada saat itu bersikap *akomodatif* terhadap pemerintah, sehingga seringkali dituduh bersikap *oportunis*. Namun dalam kurun waktu 1970-an, NU menjelma menjadi pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya adalah upaya indoktrinasi ideologi resmi negara (Pancasila).¹³

¹¹ Aminuddin, *Kekuatan dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 141.

¹² *Ibid*, hlm. 142.

¹³ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 3.

Barangkali penolakan NU inilah yang mendorong pemerintah pada dekade tahun 1980-an sangat menuntut adanya kesepakatan ideologi yang lebih jauh dan mengharuskan semua organisasi politik maupun kemasyarakatan menerima Pancasila sebagai asas dan melepaskan asas lain termasuk Islam.¹⁴ Puncaknya adalah ketika dikeluarkannya Tap MPR No. II/ MPR/ 1983 tentang GBHN yang memutuskan bahwa demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.¹⁵

Di tengah kondisi tersebut, kegelisahan dirasakan di mana-mana, Kiai Achmad sebagai ulama yang berlatar belakang organisasi NU dan saat itu menjabat sebagai *mustasyar* PBNU diberi tugas oleh ulama besar seperti: KH. Makhrus Ali, KH. As'ad, KH. Ali Ma'shum dan KH Masykur untuk mempelajari pengamalan Pancasila.¹⁶ Setelah mempelajari Pancasila dengan seksama, diambil suatu keputusan yang didukung ulama besar tersebut bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi, akan tetapi Islam tetap menjiwai asas pancasila. Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Pancasila dan Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena Pancasila merupakan rumusan yang diambil dari inti sari ajaran agama.

¹⁴ *Ibid*, hlm.4.

¹⁵ *Tap MPR RI Tahun 1983*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1983), hlm. 52.

¹⁶ Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm. 239.

Dengan diterapkannya Tap MPR tersebut, pemerintah juga menjamin bahwa pemerintah tidak akan membuat Pancasila menjadi sebuah agama baru, pemerintah hanya ingin mewariskan sebuah negara yang kuat dan bersatu bagi generasi muda, dan penerimaan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas ini seharusnya tidak menimbulkan persoalan, sebab NU (tokoh Islam pendiri bangsa) sendiri pada masa lalu turut dalam penyusunan Pancasila dengan demikian berarti telah menerima Pancasila.¹⁷

¹⁷ Martin van Bruinessen, *Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khittah 1926*, dalam Ellyas KH. Darwis (ed.), *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm.66.

BAB III

BIOGRAFI KH. ACHMAD SIDDIQ

A. Latar Belakang Keluarga

KH. Achmad Siddiq yang nama aslinya Achmad Muhammad Hasan, dilahirkan di Jember Jawa Timur pada Ahad Legi 10 Rajab 1344 H / 24 Januari 1926 M, Tujuh hari lebih tua dari usia Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir pada 31 Januari 1926. KH. Achmad Siddiq wafat pada hari Rabu 23 Januari 1991 di RSUD dr. Sutomo Surabaya, setelah dua minggu menjalani perawatan di ruang ICU akibat penyakit kencing manis yang diderita sejak tahun 1982 kambuh. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman auliya desa Tambak Kecamatan Mojo Kediri.¹

KH. Achmad Siddiq yang biasa dipanggil dengan Kiai Achmad, merupakan putera ke-16 dari 25 bersaudara, ayahnya bernama KH. Muhammad Siddiq pendiri pesantren salafiyah (kini Ash-Shiddiq Putera = Ashtra) Jember. KH. Muhammad Siddiq semasa hidupnya menikah 5 kali, masing-masing dengan: Nyai Siti Masmunah, Nyai Siti Aminah, Nyai Siti Maryam, Nyai Mardiyah dan Nyai Siti Fathimah. Dari kedua istri (Nyai Siti Aminah dan Nyai Siti Fathimah) tidak dikaruniai keturunan, kemudian dari

¹ Abdul Halim Soebahar, *Arsitek Pemikiran Islam Indonesia: Catatan Biografi KH. Achmad Siddiq*, Buku belum dipublikasikan, (Jember: Juli 2001), hlm. 11.

ketiga istri yang lain dikaruniai 25 putra-putri, tapi yang hidup hingga dewasa tinggal 10.²

Dari Nyai Masmunah lahir 7 putra, yaitu: Siti Masruah (wafat waktu kecil), KH. Mansur Siddiq (Tuban), Siti Roihanah (Lasem, Ibunda KH. Abdul Hamid bin KH. Abdullah Pasuruan), KH. Achmad Qusyairi (Pasuruan, Di kenal sangat alim mempunyai banyak karangan kitab), Asyiah (wafat waktu kecil), Asiah (wafat waktu kecil) dan Muhammad Hasan (KH. Mahmud Siddiq ayah dari KH. Hamid Wijaya, mantan Katib 'Am Syuriah PBNU). Nyai Siti Maryam melahirkan 9 putra, yaitu: KH. Mahfuz Siddiq (mantan ketua HBNO/PBNU hasil Muktamar ke-15), Abdullah (wafat waktu kecil), KH. Abdul Halim Siddiq (pengasuh ke-3 pesantren Ashtra dan pendiri pesantren Ash-Shiddiqi puteri atau Ashtri), Hj. Zaenab Siddiq (ibunda Dra. Hj. Elok Faiqotul Himmah, pengasuh PP Zainab Siddiq), Khodijah (wafat waktu kecil), Mahmud (wafat waktu kecil) Achmad Muhammad (wafat waktu kecil), KH. Abdullah Siddiq (mantan ketua Tanfidziyah NU wilayah Jawa Timur) dan Achmad Muhammad Hasan atau KH. Achmad Siddiq (mantan ketua Rois 'Am PBNU hasil keputusan muktamar ke-27 di Situbondo dan muktamar ke-28 di Yogyakarta).

Sedangkan Nyai Siti Mardiyah melahirkan 9 putra, yaitu: Abdur Rahim, Ummu Athiyah, Muhammad Sholeh, Sakinah, Maskunah, Muhammad, Hj. Zulaikhah (istri KH. Dhofir Salam, pengasuh pesantren Ashtra sebelum

² Ibid, hlm. 11. Lihat juga, "Mengenal KH. Achmad Siddiq", *Zaman* (Jakarta), 2 Februari 1985. "KH. Achmad Siddiq Ulama yang Kharismatik", *Kompas* (Jakarta), 24 Januari 1991.

KH. Abdul Halim Siddiq dan kiai Achmad, pendiri sekaligus pengasuh pertama pesantren Al-Fattah Jember), Asiyah dan Sholliyah. Dari kesembilan putra-putri tersebut hanya tinggal Hj. Zulaikah yang hidup hingga dewasa, sedang 8 orang lainnya wafat sejak kecil.³ Dari keturunan ketiga istri KH. Muhammad Siddiq tersebut, melahirkan sejumlah tokoh yang dikenal luas dalam masyarakat. Bukan hanya di kalangan NU atau lokal Jember, melainkan sudah ke tingkat nasional. Mereka adalah kiai yang sudah diakui integritas dan keilmuannya dan besar jasanya pada pertumbuhan bangsa dan negara, di antaranya adalah KH. Achmad Siddiq.

Kebesaran dan keluhuran Kiai Achmad juga dapat dilihat dari silsilah keturunannya. Kiai Achmad adalah keturunan ke-15 dari Joko Tingkir, pendiri kerajaan Islam Pajang. Secara lengkap silsilahnya dapat diurutkan sebagai berikut: Achmad Siddiq bin Kiai Muhammad Siddiq, bin Kiai Abdullah (Lasem), bin Kiai Muhammad Sholeh Tirtowijoyo, bin Kiai Asy'ari, bin Kiai Adra'i, bin Kiai Muhammad Yusuf, bin Mbah Sumbu, bin Raden Sumonegoro, bin Raden Pringgokusumo (Adipati Lasem II), bin Raden Joyonegoro, bin Pangeran Joyokusumo, bin Pangeran Hadijoyo alias Joko Tingkir atau Mas Kerebet (raja Pajang).⁴ Jadi dari faktor tersebut jelas bahwa Kiai Achmad mewarisi darah orang-orang besar yang sangat berpengaruh terhadap dirinya.

³ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 32-33.

⁴ Abdul Halim Asa, "Kiai Achmad", *Aula* (Januari 1991), hlm. 10.

Perjalanan hidup Kiai Achmad, sangatlah berat ketika Kiai Achmad baru berusia 2 tahun, ibu kandung yang dicintainya meninggal dunia saat kembali dari Makkah (1928). Selang tujuh tahun kemudian ayahnya KH. Muhammad Siddiq juga dipanggil Allah SWT. Sepeninggal kedua orang tuanya, peran untuk mengurus keluarga diambil oleh kedua saudara kandung yang lebih senior. KH. Abdul Halim (putra no. 2) mengasuh Abdullah Siddiq (putra no. 4), sedang KH. Mahfuz Siddiq kebagian membesarkan si bungsu yaitu Kiai Achmad.

Memasuki usia 21 tahun, tepatnya pada 23 Juni 1947 Kiai Achmad menikah dengan gadis bernama Sholehah asal desa Mangunsari, Tulungagung Jawa Timur. Awal kehidupan perkawinan Kiai Achmad, bisa dibilang masa-masa sulit sebab kondisi perekonomiannya kurang baik. Nasibnya kemudian sedikit membaik ketika Kiai Achmad diangkat oleh gurunya KH. A. Wahid Hasyim menjadi sekretaris pribadinya saat menjabat menjadi menteri agama.⁵ Pada tahun 1955 Kiai Achmad mendapat cobaan berat yaitu istri tercintanya meninggal dunia, dan pada tahun yang sama tepatnya pada 22 September 1955 Kiai Achmad menikah lagi dengan adik nomor tiga dari istri pertama yaitu Hj. Nihayah.

Dua kali pernikahannya, Kiai Achmad dikaruniai 13 putra-putri, tetapi yang hidup hingga dewasa 11 orang. Sebelas orang keturunan Kiai Achmad dari pernikahannya tersebut sudah mulai menampakkan cahaya. Sebelum wafat

⁵ "Mengenal Kiai Achmad Siddiq", *Zaman* (Jakarta), Februari 1985. Lihat juga, "KH Achmad", *Pelita* (Jakarta), Februari 1991.

Kiai Achmad pernah melukiskan bahwa tugas yang diembannya telah selesai, antara lain ditandai “semua anak saya sudah saya nikahkan”, tutur Kiai Achmad kepada KH. Imran Hamzah, ketika menjenguk Kiai Achmad menjelang wafatnya di RSUD dr. Sutomo Surabaya.

Kiai Achmad dengan istri pertama, Nyai Sholehah dikaruniai 5 keturunan, yaitu: Mohammad Faried Wajdi (pengasuh Ashtra, suami Hj. Nuroniah), Drs. Mohammad Rofiq Azmi (camat Sukorambi Jember), Hj. Fatati Nuriana, (pegawai Pemda Jember), Mohammad Anis Fuadi (wafat sejak kecil) dan Mohammad Farikh Fauzi.

Kemudian dengan Nyai Hj. Nihayah, dikaruniai 8 keturunan, yaitu: Asmi Furoidah (pegawai BPD Madiun), H.M. Robith Hasyimi, Moh. Syohib Shidqi (dosen USU di Payakumbu), Moh. Hisyam Rifki (menantu Gus Mik), Ken Ismi Asiati Afrik Rozana (pembina MI KH. Siddiq), Nida Dusturia (pembina TPA Al-Kautsar), Moh. Balya Firjaun Barlamman dan Moh. Muslim Mahdi (wafat waktu kecil).

Mereka adalah bintang-bintang cemerlang yang dilukiskan oleh Mbah Muslim (tokoh spiritual dari Klaten) sebagai “tumbuh seribu”, ketika mengomentari wafatnya Kiai Achmad.⁶

⁶ Abdul Hamid Asa, “Kiai Achmad”, hlm. 11

B. Latar Belakang Pendidikan

Kiai Achmad mendapatkan pendidikan awal dari keluarganya yaitu di bawah asuhan dan bimbingan ayahnya KH. Muhammad Siddiq. KH. Muhammad Siddiq dalam mendidik anak-anaknya dikenal sangat disiplin dan ketat, misalnya dalam hal mengerjakan sholat, KH. Muhammad Siddiq selalu mewajibkan anak-anaknya berjamaah.⁷

Selain mendapatkan pendidikan dari keluarganya, Kiai Achmad juga mendapatkan pendidikan formal walaupun hanya sampai pendidikan dasar (SD). Selepas dari pendidikan SD, Kiai Achmad melanjutkan ke pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.⁸ Pada pesantren tersebut semula terdapat dua madrasah yaitu: madrasah Nizamiyah dan madrasah Salafiyah. Setelah melalui ujian masuk, Kiai Achmad masuk pada kelas IV madrasah Nizamiyah, kemudian madrasah ini dihapus dan disatukan dengan madrasah Salafiyah karena menghindari dualisme madrasah.⁹

Selama di madrasah inilah Kiai Achmad mempunyai teman dekat antara lain: Kiai Shodiq Machmud, Kiai Abdullah dan Kiai Muchid Muzadi. Selain satu kelas mereka juga teman dalam kelompok belajar. Mereka juga menjadi “Fungsionaris” pengurus lampu templek yang dipergunakan sebagai alat penerangan saat belajar.

⁷ Noeh dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh*, hlm. 36.

⁸ Saifullah, “KH. Achmad Siddiq Figur Pemersatu NU”, *Pelita* (Jakarta), Januari 1991.

⁹ Soebahar, *Arsitek Pemikiran Islam*, hlm. 17.

Kiai Achmad Selama di Jombang, mendapatkan bimbingan dan perhatian dari beberapa guru terkemuka, antara lain: KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Syarqowi, KH. Mahfudz Anwar dan Mas Daim Amir Kudus. Dengan bimbingan merekalah Kiai Achmad belajar berbagai kitab kuning, di antaranya: *Tuhfah al-Atfāl*, *Fathu al-Qorīb*, *Tahrir*, *Fathu al-Mu'īn* (Fiqh), *Alfiah Ibn Malik* (Ilmu Bahasa Arab), *Jawāhir al-Kalāmiyah* (Teologi), *Waraqāt* (Ushul Fiqh), *Ilmu Falak*, *Mizan al-Qowānīn*, *Uqūdu al-Juman* dan *'Arūd wa Qowāfi* (sastra), serta *Tafsir al-Baiḍāwi* dan *Ihya' 'Ulūmu ad-dīn*.¹⁰

Sebagai murid yang masih berumur 13 tahun, tetapi Kiai Achmad sudah menampakan kacakapan dan kelebihannya, sehingga ia dihormati oleh teman-temannya. Menurut Kiai Muchith Muzadi banyak dari teman-tamannya yang tidak berani mengajak bergurau, Kiai Muchith sendiri yang terkenal “mbetik” (nakal) tidak sanggup menggoda, karena kharismanya. Bahkan guru-gurunya pun menaruh hormat dan selalu perhatian terhadap Kiai Achmad.¹¹ Tampaknya KH. Wahid Hasyim telah melihat bakat Kiai Achmad sebagai santri sekaligus sebagai kader potensial yang cukup menonjol, sehingga pada tahun 1939, Kiai Achmad dipilih sebagai kader pilihan dan pembantu utama KH. Wahid Hasyim.¹²

¹⁰ Humaidi Abdussami dan Ridwan Fakla AS (ed.), *Biografi 5 Rais 'Aam NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LTn-NU YK, 1995), hlm. 145.

¹¹ “KH. Achmad Siddiq Akan Masuk Buku Tokoh Islam Dunia”, *Surya* (Surabaya), 28 Januari 1991.

¹² Muchith Muzadi, “Beberapa Kenangan Dengan Seorang Teman, Guru dan Pembimbing Utama Al Maqfurlah Kiai Achmad Siddiq”, *Surya* (Surabaya), 2 Februari 1991.

Kepercayaan yang diberikan KH. Wahid Hasyim tidak disia-siakan oleh Kiai Achmad, bahkan menjadi motivasi untuk semakin rajin belajar, membina kelompok belajar dan meningkatkan prestasi, wawasan dan aktif dalam organisasi. Kontribusi yang telah diberikan KH. Wahid Hasyim dalam proses pembinaan kepribadian kepada Kiai Ahmad sangatlah besar, bahkan KH. Wahid Hasyimlah yang memperkenalkan keorganisasian, politik dan pemikiran-pemikiran lain kepada Kiai Achmad.

Di samping ayah dan kakakya KH. Mahfud Siddiq, banyak tokoh besar yang mempengaruhi jalan hidup dan pemikiran Kiai Achmad, di antaranya: KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU sekaligus pengasuh pesantren Tebuireng Jombang), KH. Wahid Hasyim (pembaharu pesantren Tebuireng) dan KH. Abdul Hamid (ulama dari Pasuruan sebagai pengayom spiritual Kiai Achmad).

Sedangkan dalam hal Politik, Pemikiran Kiai Achmad banyak dipengaruhi oleh Soekarno, Hatta dan Sahrir. Namun di atas segalanya Kiai Achmad selalu mencoba meneladani Nabi Muhammad SAW.¹³

C. Karier

Pendidikan dan pengalaman Kiai Achmad selama berada di pesantren Tebuireng Jombang tidak sia-sia. Bimbingan KH. Wahid Hasyim yang telah memperkenalkannya dengan dunia organisasi, politik serta berbagi pemikiran-

¹³ Kafrawi Ridwan (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Jilid IV, hlm. 270.

pemikiran strategis kenegaraan yang dikuasainya membawa Kiai Achmad mencapai keberhasilan dan kesuksesan di kemudian hari.

Sebelum terjun langsung dalam kancah perpolitikan NU yang merupakan puncak kariernya, Kiai Achmad mengawali karier dari aktivitasnya dalam GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), waktu itu Kiai Achmad menjadi ketua GPII di Jember dan Besuki (1945). Dari sinilah akhirnya karier Kiai Achmad meningkat sampai wilayah Jawa Timur.¹⁴ Kiai Achmad juga pernah menjabat sebagai kepala kantor urusan agama (KUA) Situbondo dan kepala KUA Bondowoso Jawa Timur.

Sejak tahun 1949-1952, Kiai Achmad dipercaya oleh KH. Wahid Hasyim menjadi sekretaris pribadinya, sekaligus merangkap menjadi anggota dewan harian PBNU hasil Kongres XX di Surabaya. Sebagai sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim, Kiai Achmad banyak mendapat bimbingan dan pelajaran yang membawa dirinya pada karier yang lebih tinggi yaitu menjadi pegawai menengah dan pegawai tinggi dalam keluarga kementerian agama.¹⁵

Setelah beberapa tahun di Jakarta mendampingi KH. Wahid Hasyim, kemudian Kiai Achmad diterjunkan ke Jember dan Surabaya. Kiai Achmad di Jember pernah menjabat sebagai ketua NU cabang Jember, kepala KUA Jember, Kepala KUA Karesidenan Besuki, Ketua NU Wilayah Jawa Timur (1955) dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur (Depag).

¹⁴ Abdussami dan Ridwan Fakla AS, (ed.), *Biografi 5 Rois*, hlm. 148.

¹⁵ Aboe Bakar, *Sejarah Hidup KH. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum KH. Wahid Hasyim, 1957), hlm. 258.

Kemudian pada tahun 1955-1957 menjabat sebagai Anggota DPR RI hasil pemilu pertama dari partai NU. Jabatan sebagai anggota DPR RI ternyata tidak lama, sebab pada tahun 1957 Kiai Achmad mengundurkan diri.¹⁶ Baru pada tahun 1971, Kiai Achmad kembali aktif di DPR RI.¹⁷

Karier Kiai Achmad mencapai puncak manakala ia terpilih sebagai Rois 'Am mendampingi Gus Dur (Ketua Umum PBNU) yang terpilih pada waktu Muktamar NU ke-27 di pesantren Asembagus Situbondo Jawa Timur (1984).

Masuknya Kiai Achmad dalam tampuk kepemimpinan Syuriyah PBNU, telah banyak memberi corak lain Jamiyah NU, di antaranya yang paling monumental adalah ide tentang Khittah 1926. Dalam hal ini Kiai Achmad ingin membawa NU kembali pada peran NU semula. Kontribusi lain Kiai Ahmad terhadap NU adalah sikap penerimaan (secara pribadi) terhadap Pancasila sebagai asas tunggal yang kemudian di sepakati bersama menjadi asas organisasi NU.

Kepemimpinan Kiai Achmad dalam tubuh NU dinilai memberikan suasana yang sangat kondusif, sehingga pada periode berikutnya, yaitu pada Muktamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1989, Kiai Achmad kembali terpilih menjadi Rois 'Am PBNU periode 1989-1994 mendampingi

¹⁶ Pengunduran diri Kiai Achmad sebagai anggota DPR RI tersebut, diambil sebagai sikap Kiai Achmad menentang kekerasan nasakom yang dipopulerkan oleh Soekarno (Presiden RI pertama).

¹⁷ Saefullah Ma'shum (ed.), *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 64.

Abdurrahman Wahid.¹⁸ Pada kepemimpinan kedua ini kondisi Kiai Achmad mulai menurun dan sering sakit-sakitan. Tetapi kondisi ini tidak menyurutkan keinginan Kiai Achmad untuk selalu mengabdikan pada umat. Ketika berlangsungnya Munas MUI 1990 di Jakarta, Kiai Achmad memaksakan diri datang walau kondisinya kurang sehat atas penyakit kencing manis yang dideritanya.

Kiai Achmad kemudian jatuh sakit dan menjalani perawatan di RSUD dr. Soetomo Surabaya. Setelah sekian lama menjalani perawatan, akhirnya Kiai Achmad meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1991.¹⁹ Kiai Achmad meninggal sebelum masa jabatannya sebagai Rois 'Am berakhir, kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi warga NU utamanya.

D. Karya-karyanya

Sebagai seorang ulama yang mempunyai pemikiran moderat, Kiai Achmad juga termasuk ulama yang produktif menulis, baik itu berupa makalah (tek pidato, ceramah dll), maupun berupa karya buku. Di antara karya-karyanya yang berupa buku adalah :

¹⁸ "Khittah Akan Beri Angin Segar", *Lampung Post* (Jakarta), 1 Desember 1989. Lihat juga, "Muktamar NU Ke-28", *Simponi* (Jakarta), Edisi 22 Nov. 1989.

¹⁹ "Selamat Jalan Kiai Achmad", *Aula* (Februari 1991), hlm. 12.

1. *Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama*, (Surabaya, Oktober 1969), Buku ini diterbitkan oleh FOSSNU Jatim.

Buku ini berisi dalil perjuangan, yaitu dasar-dasar pikiran yang dipergunakan oleh imam-imam *mujtahid* dalam berijtihad tentang masalah hukum Islam. Selain itu buku ini memuat dalil hukum di dalam menanggapi berbagai persoalan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dll.

2. *Khittah Nahdliyah*, (Jember, April 1979).

Buku ini berisi tentang ciri *jamā`ah dīniyah*, kedudukan ulama, *ahlu as-sunnah wa al-jamā`ah*, bahaya-bahaya bagi kemurnian ajaran agama Islam, *tawassuth wa al-i`tidāl*, pola berorganisasi, konsep dakwah, *mabarrat*, ekonomi, *mu`āmalah*, dan *`izzu al-Islām wa al-muslimah*.

3. *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, (Jakarta, November 1985).

Buku ini berisi tentang garis-garis besar Islam, Islam dan Indonesia, hubungan Pancasila dengan Islam, pengembangan *ukhuwah Islāmiyah* dan integrasi nasional.

4. *Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, (Surabaya, 1992), merupakan kumpulan makalah yang disunting oleh Abu Nahid dan diterbitkan oleh Aula.

Buku ini berisi tentang *aqidah*, *syariah* dan *tasawuf* serta khittah NU 26, hubungan agama dan Pancasila, negara RI bentuk final, watak sosial *Ahlu as-sunnah*, serta Seni dan Agama.

5. *Al-Ghaffār al-Hajj Achmad Siddiq al-Maulūd fī Jambar, Zikr al-Gāfilīn Liman Ahabba `an Yasraha ma`a al-Auliyā` wa ash-Shālihīn* "Majmu`ah".
Buku ini berisi tentang *asma' al-husna, tawasul bi al-fatihah, sholawatu al-muqarrabin* dan zikir-zikir lain.
6. *Ahmad Siddiq, Al-`Aurad, Fi al-Ma`had al-Islami ash-Shiddiqi* "Majmu`ah", 1 Muharram 1412 H.
Buku ini berisi tentang berbagai macam wirid dan shalawat.
7. *Kepemimpinan NU dan Tajdīd*, (Jakarta: November 1999), diterbitkan oleh Yayasan Saifuddin Zuhri.
Buku ini merupakan hasil transliterasi rekaman pidato KH. Achmad Siddiq dalam mengawali jabatan sebagai Rois `Am syuriyah PBNU ke- 27 di Situbondo.

BAB IV

PEMIKIRAN KH. ACHMAD SIDDIQ TENTANG *TAJDIID*

(PEMBAHARUAN) DAN PANCASILA

A. Tajdid

Istilah *tajdid* (تجدید) berasal dari kata *jaddada* (جدد) *yujaddidu* (يجدد) yang berarti membuat suatu menjadi baru kembali, sedang kata *mujaddidun* (مجدد) berarti pelaku perbuatan *tajdid*.¹ Dalam redaksi lain, *tajdid* sering disebut juga sebagai : pembaharuan, inovasi dan modernisasi.²

Harun Nasution mengartikan pembaharuan (*tajdid*), yaitu sesuatu yang lama yang perlu diperbaharui. Ia sudah usang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka perlu adanya pembaharuan.³ Dalam redaksi lain,

Harun Nasution menyatakan:

“Modernisme atau pembaharuan berarti pikiran aliran, gerakan dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham adat-istiadat yang sudah lama untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen”.⁴

¹ KH. Achmad Siddiq, “Pokok-pokok Pikiran tentang Tajdid”, *Aula* (Januari 1988), hlm. 15. Lihat juga, Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan Terjemahan/Penafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 85.

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. XIV, hlm. 174.

³ Harun Nasution, “Antara Pembaharuan dan pemurnian”, *Pesantren* (Jakarta), No. 1/ Vol. V/ 1998, hlm. 30.

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 11.

Menurut KH. Ali Yafie:

“*Tajdīd* merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegangan pada dasar-dasar (*ushul*) yang sudah diletakkan oleh agama melalui proses pemurnian yang dinamis”.⁵

Menurut pandangan Kiai Achmad, berbicara *tajdīd* berarti berbicara tentang kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam, yang seringkali kesempurnaan tersebut tertutup oleh debu-debu maupun kotoran-kotoran dari luar Islam baik berupa sisa-sisa kepercayaan lama, maupun mitos-mitos baru yang terselubung modernisme. Di samping itu kekakuan cara berpikir seringkali menghambat penerapan ajaran Islam ketika berhadapan dengan problem-problem dan kasus-kasus baru dalam tatanan kehidupan nyata.⁶ Sehingga di sinilah peran *mujaddid* diperlukan.

Dalam Islam, *tajdīd* bertujuan meluruskan kembali pemahaman keislaman akibat pencampuradukan *khurafat*, *bid'ah* dan lain-lain dengan ajaran-ajaran Islam murni. Islam murni adalah Islam yang diajarkan Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW. Islam yang dimaksud adalah Islam yang utuh dan sempurna, yang tidak cacat yang terangkum dalam kitab al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal inilah yang kemudian menjadi pedoman pokok bagi setiap muslim, termasuk para *mujaddid* (pembaharu).⁷

⁵ Ali Yafie, “Tajdīd adakah suatu kemestian?”, *Pesantren* (Jakarta), No. 1 / vol. VI 1988, hlm. 3.

⁶ Siddiq, *Pokok-pokok Pikiran*, hlm. 14.

⁷ Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Kembali Ruh*, hlm. 53-54.

Dalam memperkuat argumennya, Kiai Acmad memakai landasan hadits Nabi SAW, yaitu:

ان الله تعالى يعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد دينها و في رواية امر دينها (رواه ابو داوود و الحكم و البيهقي)

“Sesungguhnya Allah SWT, membangkitkan untuk umat ini tiap seratus tahun, orang (atau orang-orang) yang “*mujaddid*” agama bagi mereka”. (HR. Abu Dawud al-Hakim dan Baihaqi).

Berangkat dari landasan tersebut, *tajdid* menurut Kiai Achmad diartikan sebagai “memulihkan” sesuatu kepada keadaan semula (ketika masih baru, sebelum terkena debu-debu atau kotoran kotoran), bukan berarti “mengganti” sesuatu yang lain, dengan yang “baru”.⁸

Usaha pembaharuan tidak hanya dibebankan pada perorangan saja, akan tetapi suatu organisasi pun dapat mengambil peranan tersebut, misalnya NU. NU sebagai organisasi sosial-keagamaan peranannya dalam pembaharuan sangat dibutuhkan terutama dalam mensikapi isu-isu modernisasi, sekularisasi dan sebagainya yang saat ini dinilai sangat meresahkan umat Islam.⁹ Secara rinci, Kiai Achmad membagi fungsi *tajdid* menjadi tiga, yaitu:

⁸ Siddiq, *Pokok-pokok Pikiran*, hlm. 14-15.

⁹ “Tajdid menurut Pandangan NU”, *Aula* (Januari 1988), hlm. 8.

- a. Al-I'ādah (الاعادة), artinya pemulihan ajaran Islam, dipisahkan atau dibersihkan dari campuran unsur-unsur yang merugikan dan mengganggu kemurnian dan kesempurnaan Islam.
- b. Al-Ibānah (الابانة), artinya membedakan yang sunah dari yang *bid'ah* secara cermat oleh para ahlinya.
- c. Al-Ihyā' (الاحياء), artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari ajaran Islam yang pengamalannya terbengkalai atau terhenti.

Jadi berdasarkan tiga fungsi di atas, Kiai Achmad mengharapkan upaya *tajdīd* dapat mengembalikan kondisi Islam yang dipenuhi debu-debu dan karat agar kembali menjadi bersih, jernih dan tidak menyimpang.

Menurut Kiai Achmad, terdapat tiga hal yang mencerminkan terhadap kesempurnaan Islam, yaitu:

- a. Kebenaran yang mutlak (الحق المطلق), tidak akan berubah dan berkembang.
- b. Kelengkapannya (كافة), meliputi segala aspek kehidupan.
- c. Kelenturannya karena kefitriannya, sehingga selalu dapat diterapkan di segala tempat dan segala zaman yang selalu berkembang.¹⁰

Lebih lanjut Kiai Achmad menjelaskan kesempurnaan tersebut bukan berarti Islam mengatur segalanya secara ketat, terinci dan seragam tetapi ada hal-hal yang diatur secara longgar, bahkan ada yang seperti tidak diatur tetapi

¹⁰ Noeh dan Mastudi HS (ed.), *Menghidupkan Ruh*, hlm. 56.

diserahkan kepada kebijaksanaan manusia dengan syarat tidak melanggar garis-garis ajaran agama.

Kiai Achmad juga merumuskan tugas *tajdīd* yang harus dilaksanakan oleh NU dalam menjaga kesempurnaan Islam, yaitu dengan jalan:

- a. Menilai masa lalu (المحافظة على القديم الصالح)
- b. Mengembangkan masa kini (والاخذ بالجدید الاصلح) dan
- c. Merintis masa depan.¹¹

Menilai masa lalu berarti: (1) Memperhatikan nilai-nilai positif hasil pemikiran / *ijtihād* generasi yang lalu (Sahabat dan Mujtahidin) (2) Memurnikannya dari pengaruh / percampuran unsur-unsur *khurafat israiliyat* dan *nasraniyat*, adat kebiasaan yang bertentangan dengan Islam.

Mengembangkan masa kini berarti: (1) Menerima hal-hal baru yang bermanfaat yang tidak bertentangan dengan Islam, serta mengembangkannya ke arah yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. (2) Menolak dan mencegah hal-hal baru yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan Islam.

Merintis masa depan berarti : (1) Menciptakan konsepsi dan inisiatif baru di bidang tehnik, perjuangan yang tidak bertentangan dengan asas dan haluan perjuangan: *Islam 'Ala Maḥabi Ahli as-sunnah wa al-Jamā'ah*. (2) Megadakan usaha / langkah preventif untuk menutup / mempersempit jalan

¹¹ KH. Achmad Siddiq, *Pedoman Berpikir NU*, (Surabaya; FOSSNU, 1992), hlm.15.

berkembangnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan Islam.

Berbicara mengenai *mujaddid* (pelaku *tajdid*), Kiai Achmad menjelaskan bahwasanya seorang *mujaddid* itu haruslah tokoh yang memenuhi persyaratan yang berat, setaraf dengan persyaratan seorang *ahladz-dzikir* sesuai dengan yang tercantum dalam surat an-Nahl 43, meskipun tidak harus setingkat dengan *mujaddid mutlaq mustaqil*. Di antara persyaratan yang harus dikuasai *mujaddid* adalah :

- a. Penguasaan ilmu yang luas dan mendalam terhadap ajaran Islam, mulai dari *hikmah tasyri'*, *falsafah tasyri'*, *ulumu al-Qur'an*, *hadis*, *ulumu al-Ahkam* dan sebagainya.
- b. *Ġiroh* yang tinggi dan luhur untuk membela, mempertahankan, dan mengembangkan agama Islam serta pengamalannya secara benar.
- c. Sikap mental (akhlak) yang luhur, berwujud kejujuran, kecermatan, kesungguhan dan sebagainya.¹²

Melihat ide-ide yang telah dijelaskan di atas, bahwasannya Kiai Achmad ingin berusaha menghidupkan kembali semangat *tajdid* guna menghadapi segala tantangan yang terus berkembang di masyarakat, dengan melalui tiga aspek yaitu menilai masa lalu, mengembangkan masa kini dan merintis masa depan.

¹² Siddiq, *Pokok-pokok Pikiran*, hlm. 16.

1. Ijtihād

Ijtihād menurut bahasa berasal dari kata *ijtihadu* (اجتهاد) yang berarti sungguh-sungguh, berusaha keras. Menurut terminologi *ijtihād* berarti mengerahkan seluruh daya pikir untuk menemukan hukum sesuatu hal berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits.¹³

Secara historis, *ijtihād* ada dan tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yaitu masa Nabi. Kemudian berkembang pada masa Sahabat dan Tabi'in. Perkembangan selanjutnya mengalami pasang-surut dari masa kejayaan (Imam *Ma'hab*) sampai masa suram (Masa *taklīd*, tertutupnya *ijtihād*). Hal ini disebabkan karena berkurangnya semangat *ijtihād* para *mujtahid* yang lambat-laun menjadi lesu dan kualitas serta kuantitasnya semakin menurun.¹⁴

Setelah melihat fenomena yang terjadi, Kiai Achmad tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan pintu *ijtihād* tertutup. Ia menganggap bahwa *ijtihād* masih dapat dilakukan sampai sekarang.¹⁵

Dalam hal ini Kiai Achmad menggarisbawahi, bahwasanya *ijtihād* itu hanya berlaku terhadap hal-hal yang bersifat *dhanni* dan *badhari* (memerlukan peninjauan lebih lanjut, memilih satu kemungkinan

¹³ Noeh dan Mastuki HS (ed.), *Menghidupkan Ruh*, hlm. 59.

¹⁴ Amin Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihād suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 33.

¹⁵ KH. Achmad Siddiq, *Kepemimpinan NU dan Tajdid*, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1999), hlm. 21.

pengertian dari beberapa kemungkinan). Sedangkan hal-hal yang bersifat *qot`i* (jelas, tegas) dengan dalil-dalil pasti *ijtihad* tidak diperlukan lagi.¹⁶

Kiai Achmad menguraikan lebih lanjut, bahwa dalam perbuatan *ijtihad* mengandung beberapa unsur:

- a. Mujtahid (مجتهد), orang yang melakukan perbuatan *ijtihad*.
- b. Masalah (مسألة), sesuatu yang diijtihadi.
- c. Methoda (طريقة), cara mengambil kesimpulan / pendapat.
- d. Landasan (الدليل), yaitu: al-Qur'an dan Sunnah.
- e. Hasil (النتيجة), yaitu hukum/ pendapat mengenai sesuatu masalah.

Sudah barang tentu dalam berijtihad, seorang mujtahid harus memenuhi kriteria persyaratan. Pertama, *mujtahid* harus menguasai ilmu *ushul fiqh* dan *qowaidu al-fiqhiyah*. Selain dua ilmu tersebut *mujtahid* juga harus menguasai :

1. Perbendaharaan ilmu pengetahuan agama yang luas
2. Perbendaharaan ilmu tentang al-Qur'an dan as-Sunnah
3. Penguasaan ilmu bahasa arab, mengenai bahasa, sastra, tatabahas dan lain-lain
4. Memahami ilmu tafsir dan tata cara penafsiran secara benar
5. Memahami ilmu hadits, dari seleksi, kategori sampai tata cara penafsiran hadis

¹⁶ Siddiq, *Pedoman Berpikir NU*, hlm. 41.

Kedua, seorang *mujtahid* harus mempunyai landasan yang tinggi bahwa *ijtihad* yang dilakukan merupakan karena Allah semata, dengan mengesampingkan urusan pribadi juga harus dilandasi akhlak yang luhur, niat yang murni dan keihlasan yang tinggi.¹⁷ Dalam buku pedoman berfikir NU, Kiai Achmad menambahkan satu syarat, yaitu *mujtahid* harus menguasai metoda, logika dan ketajaman analisis yang seksama.

Dilihat dari persyaratan diatas, memang sangatlah berat untuk menjadi seorang *mujaddid*. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat melakukan *tajdid*, ini semua dimaksudkan agar *tajdid* yang dilakukan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

Selama ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup, bahkan organisasi besar seperti NU dianggap oleh kalangan tertentu tidak lagi memakai *ijtihad* dan lebih memakai cara *taqlid*. Menanggapi permasalahan tersebut, Kiai Achmad menyangkal semua pendapat yang menyatakan bahawa pintu *ijtihad* tertutup, NU pun sampai saat ini masih mengakui berlangsungnya *ijtihad*, tetapi ditegaskan oleh Kiai Achmad, kenyataan menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada seorang ulama yang memenuhi syarat sebagai *Mujtahid Mustaqill* yang mempunyai otoritas *istinbath mutlak*.

¹⁷ Siddiq, *Khittah Nadliyah*, hlm. 41-42.

Untuk lebih jelasnya, Kiai Achmad membagi *mujtahid* menjadi tiga tingkatan,¹⁸ yaitu:

- a. *Mujtahid Mullaq* (مجتهد مطلق), yaitu imam (tokoh agama) yang mampu berijtihad sendiri dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan metode yang ditemukan / dirumuskan sendiri dan diakui kekuatannya oleh para tokoh agama (imam) lainnya. *Mujtahid Mullaq* juga di sebut *Mujtahid Mustaqill*, artinya mujtahid bebas, tidak terikat oleh hasil ijtihad atau metoda imam lain. Di antara *mujtahid mullaq* ini yang terkenal antara lain: Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.
- b. *Mujtahid Mazhab* (مجتهد مذهب), yaitu seorang yang sudah mampu berijtihad sendiri dari al-Qur'an dan as-Sunnah tetapi dari segi metoda dan kaidah masih memakai milik *mujtahid mullaq*.
- c. *Mujtahid Fatwa* (مجتهد فتوى), yaitu seseorang yang mampu menilai mana yang terkuat (*tarjih*) di antara pendapat-pendapat yang berkembang dalam suatu mazhab. Dari pendapat-pendapat tersebut kemudian dipilih untuk difatwakan (disampaikan kepada yang memerlukan).

Jadi pada hakekatnya *ijtihad* ulama masa kini haruslah melalui para ulama terdahulu yaitu dengan mempelajari hasil-hasil karyanya. Kiai Achmad sendiri sangat tidak setuju dengan gejala yang selama ini terjadi, bahwa cara berijtihad yang melompati terhadap ulama terdahulu, dalam arti

¹⁸ *Ibid*, hlm. 40.

mereka tidak mau mempelajari hasil *ijtihad* ulama terdahulu sehingga pengetahuan ajaran agama menjadi sangat kurang dan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal semacam ini menurut Kiai Achmad disebabkan oleh adanya kejumudan (kebekuan ulama), dan keinginan untuk mengambil alih peran ulama secara gampang dan cepat.¹⁹

2. Pembaharuan Tasawuf

Perkembangan *tasawuf* menurut Kiai Achmad, sudah ada sejak zaman Rasulullah dan *Khulafa' ar-Rasyidin*. *Tasawuf* saat itu masih bercampur dalam segala aspek ajaran Islam. Kemudian Kiai Achmad membagi *tasawuf* menjadi dua, yaitu: *tasawuf* ketika masih menjadi metoda *amaliyah ibadah* dan *tasawuf* sebagai disiplin ilmu.²⁰ Pada masa setelah Nabi dan Sahabat, yaitu masa *Tabi'in*, *tasawuf* masih berkedudukan sebagai metoda *amaliyah* yang berfungsi untuk menyempurnakan praktek atau amai ibadah untuk mencapai derajat lebih tinggi, misalnya penyempurnaan pada niat sholat, puasa dan lain-lain.

Secara tehnik, istilah *tasawuf* memang belum dikenal pada masa Nabi dan Sahabat, akan tetapi bukan berarti *tasawuf* tidak tercakup dalam agama Islam. Menurut Kiai Achmad *tasawuf* telah tercakup dalam totalitas

¹⁹ Mastuhu, *Tiga Ulama Termasyhur di Jawa Timur*, Development Studies, Penelitian Tentang Pandangan dan Sikap Hidup Ulama Indonesia, (Jakarta: LIPI, 1987), hlm. 195-196.

²⁰ Noeh dan Mastuki HS (ed.), *Menghidupkan Ruh*, hlm. 75.

Islam,²¹ sebagaimana Nabi pernah meringkas totalitas Islam (seluruh isi al-Qur'an tentang ajaran agama) menjadi tiga unsur, yaitu: Iman, Islam dan Ihsan. Ketiga unsur tersebut oleh Kiai Achmad dianalogikan sebagai: Iman merupakan aqidah, Islam merupakan syari'ah dan Ihsan identik dengan *tasawuf*. Ihsan merupakan sikap mental dalam melaksanakan segala kewajiban kepada Allah dengan penghayatan dan pengamalan batin yang berkesan.²² Sikap inilah yang kemudian berkembang menjadi landasan *tasawuf*, yang mana *tasawuf* merupakan cara atau metode yang menghantarkan pada pencapaian ihsan.

Sebagai cikal bakal munculnya *tasawuf*, Nabi sendiri telah memberi tauladan melalui *tahannus* atau *uzlah*, mencari kejernihan jiwa serta bertafakur memohon petunjuk kepada Allah dalam Goa Hiro. Keteladanan Nabi tersebut melalui muatan ketekunan dalam beribadah, ketabahan mental, kesederhanaan, rasa syukur serta kesadaran diri atas kelemahan dalam melakukan kewajiban merupakan suatu pengalamam praktek dari kesufian Nabi.

Berangkat dari pengalaman Nabi tersebut, Kiai Achmad mencoba menunjukkan bahwa *tasawuf* lahir dari Islam. Kiai Achmad tidak sependapat

²¹ KH. Achmad Siddiq, *Nuzulul Qur'an Detik Sejarah Kenabian dan Timbulnya Peradaban Baru yang Merambah Wajah Dunia*, Makalah disampaikan dalam Peringatan Nuzulul Qur'an di Unej, 27 Agustus 1978, hlm. 2-3.

²² *Ibid*, hlm. 3.

terhadap pendapat yang mengatakan bahwa *tasawuf* lahir dari luar Islam ataupun pengaruh dari luar Islam. Menurut Kiai Achmad, keteladanan Nabi merupakan bukti kuat bahwa *tasawuf* lahir dari Islam, pendapat Kiai Achmad ini juga diperkuat oleh dalil-dalil al-Qur'an, yaitu surat al-Anfal ayat 17, yang artinya "Pada Hakekatnya tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allahlah yang melempar". Kiai Achmad mencoba menafsirkan kata *hakekat*, yang bermuatan subyek (*fa'il*), subyek tersebut adalah Allah. Jadi ayat tersebut berusaha mendorong manusia untuk memikirkan hakekat Allah.

Selanjutnya *tasawuf* jauh setelah periode Nabi, mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Istilah *tasawuf* merupakan istilah yang diambil dari Islam, sedang menurut kaum barat menyebut istilah *tasawuf* dengan istilah *Sufisme*. *Tasawuf* (تصوف) merupakan asal kata dari *Sufi* (صوفي). Banyak istilah yang dipakai dalam mengartikan *tasawuf*, antara lain: *Suf* (صوف) berarti kain yang terbuat dari bulu domba yang kasar.²³ Sedang orang yang memakainya di sebut *sufi* atau *mutasawwif*. Secara terminologi *tasawuf* adalah upaya mengelola atau mengembangkan sikap

²³ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 56-57. Lihat juga, Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 190. Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 71.

dan emosi agama dalam rangka mencapai kehidupan yang diridloi Allah atau dalam rangka mencapai kedekatan dengan-Nya.²⁴

Seiring dengan perkembangan tasawuf, berkembang pula istilah “*tarekat*”. Tarekat berasal dari bahasa arab “*ṭariqah*” yang berarti “jalan”. *Tarekat* dipakai oleh si pelaku sebagai usaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas kediriannya sebagai manusia dan memdekatan diri ke sisi Allah swt. Istilah tarekat kemudian sering dikaitkan dengan suatu organisasi tarekat, yaitu suatu kelompok organisasi (dalam lingkungan Islam Tradisional) yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan menyampaikan sumpah yang formulanya telah di tentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tersebut.²⁵

Menurut Bambang Pranowo, antara tarekat dan tasawuf mempunyai kesamaan, yang membedakan adalah *tasawuf* merupakan segi intelektualnya sedang tarekat merupakan segi praktis atau jalan dan pengamalannya. Namun keduanya saling melengkapi satu sama lainnya.²⁶

Menurut Kiai Achmad, *aqidah-syari'at-tasawuf* serta tarekat itu merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

²⁴ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), cet. I, hlm. 931.

²⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesanren; Studi Tentang Pandangan Hdup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 135.

²⁶ Bambang pranowo, “Menjadi Penganut Tarekat itu Tidak Gampang”, *Pelita* (Jakarta), 22 Des 1994.

Gejala yang ada sekarang bahwa *tarekat* berjalan sendiri lepas dari induknya, yaitu *tasawuf*, dan perlu diingat bahwa hampir dipastikan setiap ulama juga mengikuti tarekat. Bahkan Kiai Achmad sendiri mengikuti tarekat Naqsabandiyah. Kiai Achmad menjelaskan bahwa *tasawuf* itu mempunyai empat dimensi, yaitu: (1) *metafisika*, (2) *estetika*, (3) *etika* dan (4) *pedagogiek*. Dengan kata lain Kiai Achmad ingin mengatakan dalam *tasawuf* itu terkandung unsur-unsur rasional dan unsur-unsur irasional.²⁷

Kiai Achmad menjelaskan lebih lanjut, *tasawuf* sebagai ilmu harus mempunyai fungsi praktis bagi kaum muslim, tidak hanya terjangkau oleh orang-orang tertentu saja, akan tetapi *tasawuf* bisa dijangkau oleh siapa saja, dengan kata lain diistilahkan dengan “memasyarakatkan ilmu dan amal tasawuf”.²⁸ Munculnya anggapan bahwa tasawuf itu hanya khusus untuk sebagian kecil kaum muslim, menurut Kiai Achmad harus diubah, semua umat Islam bisa dan bahkan wajib bertasawuf, sebagaimana wajib bertauhid dan berfiqih, tentunya *biqadri al-istitā`ah*-nya masing-masing.

²⁷ Mastuhu, “Aspek Pemikiran KH. Achmad Siddiq”, *Pelita* (Jakarta), 25 Januari 1991.

²⁸ KH. Achmad Siddiq, *Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf*, Dalam Abu Nahid (ed.), *Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, (Surabaya: Yayasan Majalah Aula, 1992), hlm. 16-17.

Kiai Achmad membagi *tasawuf* dalam tiga tingkatan, yang dapat menuntun seseorang untuk bertasawuf dari tingkat pertama menuju tingkat yang lebih tinggi²⁹, yaitu;

Pertama, *Istiqāmah* (الاستقامة), berarti tekun, telaten, terus-menerus tidak bosan-bosan, mengamalkan apa saja yang dapat diamalkan. Tentunya dimulai dengan kewajiban rutin ditambah sedikit demi sedikit, menuntut kemampuan dengan cara yang tekun.

Kedua, *zuhud* (الزهد), berarti terlepas dari ketergantungan hati atau bathin dengan harta benda, kekuasaan, kesenangan dan sebagainya yang ada di tangannya sendiri apalagi yang ada di tangan orang lain.

Ketiga, *Faqr* (الفقر), artinya selalu menyadari kebutuhan diri kepada Allah. Setiap orang “mengerti” bahwa dirinya membutuhkan Allah, karena manusia adalah ciptaan-Nya. Tetapi “kesadaran mendalam dan terus menerus” tidak selalu ada pada setiap orang. Apabila ditarik ke garis yang lebih tinggi, *al-faqr* berarti kesadaran bahwa diri ini tidak memiliki sesuatu sama sekali yang bernilai di hadapan Allah.

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrowi, Kiai Achmad berusaha memodernisasikan *tasawuf*, yaitu melalui jalan membersihkan segala unsur-unsur *bid'ah*, *syirik* dan sebagainya. Kemudian meletakkan kedudukan tarekat di tengah garis

²⁹ *Ibid*, hlm. 17-19.

antara *tarekat-tasawuf-syari'ah-aqidah* dalam satu kesatuan. Usaha nyata yang dilakukan oleh Kiai Achmad dalam merealisasikan memodernisasi *tasawuf*, yaitu dengan cara mengajarkan praktek bertasawuf (*tarekat*) di pesantren yang ia asuh kepada siapa saja yang berminat mengikutinya. Pada masa hidupnya praktek *tasawuf* diajarkan setiap senin malam dalam bentuk zikir sebagai bentuk dari ibadah.³⁰ Ajaran *tasawuf* ini dapat dipelajari melalui karyanya yang berjudul *al-Ghaffār al-Hajj Ahmad Shiddiq al-Maulūd fī al-Jambar, Żikru al-Ghāfilīn liman Ahabba `an Yasyraha Ma'a al-Auliya' wa ash-shalihin 'Majmu`ah*" yang berisi tentang *Asmā' al-Husna, Tawasul bi al-Fatihah, Sholawat al-Muqarrabīn* dan sebagainya.

B. Pancasila

Menurut Kiai Achmad, Pancasila adalah falsafah bangsa dan dasar negara yang dikehendaki atau seharusnya menjadi norma-norma bagi sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Norma Pancasila merupakan norma-norma yang lahir dari hasil pengumpulan dan perumusan alam pikiran yang esensial yang terdapat di masyarakat bangsa Indonesia.³¹ Sehingga terbentuklah lima butir nilai luhur. Lima butir nilai luhur tersebut kemudian disusun dan disepakati

³⁰ Mastuhu, "Aspek Pemikiran KH Achmad Siddiq", *Pelita* (Jakarta), 2 Januari 1991.

³¹ KH. Achmad Siddiq, *Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Lakpesdam, 1985), hlm. 3.

bersama menjadi dasar negara nasional, dalam mendirikan Negara Republik Indonesia.

Sebagai hasil pengumpulan (perumusan esensi) dari alam pikiran yang tersebar, Pancasila dipandang satu rangkaian kesatuan dan tidak boleh hanya diambil sebagian dengan meninggalkan sebagian yang lain.

Penerimaan lima butir sebagai dasar negara nasional ini, dilandasi oleh kesepakatan bersama semua golongan dari bangsa Indonesia, baik itu kelompok ideologi, etnis, budaya maupun keagamaan. Menurut Kiai Achmad, lima butir tersebut dirangkaikan dengan hasil konsensus maksimal yang merupakan "*Kalimatun sawu-in bainana wabainakum*", bagi bangsa dan warga negara Indonesia.³²

Selanjutnya kesepakatan terhadap lima butir tersebut, ditindaklanjuti dengan merumuskan secara redaksional oleh panitia kecil dalam BPUPKI yang dikenal dengan panitia sembilan³³, yang menghasilkan rumusan yang dikenal dengan *Piagam Jakarta*. Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kemudian disahkan pada tanggal 14 juli 1945 oleh BPUPKI.

³² KH. Achmad Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, Dalam Abu Nahid (ed.), *Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, (Surabaya: Yayasan Majalah Aula, 1992), hlm. 103.

³³ Abdul Aziz Thaba dan Afan Gaffar, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 155.

Piagam Jakarta yang memuat Pancasila sebagai dasar negara tersebut, ketika hampir diumumkan secara resmi, mengalami perubahan,³⁴ yaitu pada butir pertama, yang berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya” . Perubahan pada butir pertama tersebut disebabkan adanya sikap keberatan dari pihak non Islam, yaitu Protestan dan Katholik, dengan alasan kalimat tersebut tidak mengikat mereka dan hanya mengutamakan kepentingan Islam sehingga dinilai sebagai suatu yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Sehingga untuk menjaga disintegrasi maka dipilih kesepakatan untuk merubah butir pertama.³⁵

Untuk mengimbangi hilangnya tujuh kata butir pertama, disempurnakan dengan kalimat “Yang Maha Esa”. Sila pertama ini menurut Kiai Achmad mencerminkan pengertian tauhid (monotheisme murni) sesuai dengan *Aqidah Islamiyah* (Surat al-Ikhlâs). Kiai Achmad juga menambahkan, bahwasannya sila pertama merupakan pencerminan dari *amanu*, sedang empat sila berikutnya mencerminkan *amilu as-salihat*.³⁶

Penghapusan tujuh kata atas sila pertama, dinilai sebagai kerugian besar bagi umat Islam. Akan tetapi perubahan tersebut merupakan sikap

³⁴ KH. Achmad Siddiq, *Islam Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, (Jakarta: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr PBNU, 1985), hlm. 15-16.

³⁵ Anshari, *Piagam Jakarta*, hlm. XV.

³⁶ Siddiq, *Hubungan Agama*, hlm. 104.

toleran dan hadiah besar umat Islam terhadap golongan lain, yaitu dengan adanya saling pengertian bahwa perubahan ini tidak menghapus jiwa rumusan dari sembilan tokoh yang merumuskan dulu, terutama kadar pencerminan unsur Islam di dalamnya.³⁷

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dimaksudkan oleh Kiai Achmad adalah Pancasila sebagaimana termuat dan dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan sila-silanya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisah-pisahkan yang mempunyai susunan *hirarki* dan *piramidal*. Jadi intisari urutan dari lima butir itu menunjukkan satu rangkaian tingkat. Tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. Dalam susunan hirarkis-piramidal ini, maka sila pertama menjadi basis dari sila kedua, begitu juga seterusnya.³⁸

Kemudian Kiai Achmad mempertegas kedudukan Pancasila dan agama. Menurutnya, Pancasila tetaplah Pancasila, Pancasila bukan ajaran wahyu ataupun agama. Pancasila adalah ideologi yang merupakan penggalian terhadap alam fikiran bangsa Indonesia yang religius, akan tetapi karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi, dalam kehidupan sehari-hari ada yang secara berlebihan menganggap bahwa "ideologi adalah

³⁷ Siddiq, *Islam Pancasila*, hlm. 106.

³⁸ Siddiq, *Hubungan Agama*, hlm. 106.

agama”, padahal bagaimanapun hebatnya ideologi tetaplah produk pemikiran manusia dan tidak akan sampai pada derajat agama.³⁹ Secara filsafat Pancasila menurut Kiai Achmad mempunyai dua makna,⁴⁰ yaitu: Pertama, filsafat praktis yang harus diamalkan dan tidak hanya sekedar diketahui. Kedua, filsafat normatif dalam arti Pancasila melahirkan norma-norma yang harus diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku perbuatan.

1. Hubungan Agama dan Pancasila

Pemikiran Kiai Achmad yang paling fundamental adalah pandangannya tentang hubungan agama dan Pancasila. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Pancasila sebagai ideologi dapat juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam arti lain adalah falsafah bangsa Indonesia.

Pranarka membedakan antara ideologi dan agama. Agama menurutnya dibentuk oleh pewahyuan (al-Qur'an) dan iman, sementara ideologi dibentuk oleh manusia dalam komunitasnya.⁴¹ Dari sini terlihat bahwa antara pandangan Kiai Achmad dengan Pranarka terdapat kesamaan.

³⁹ Abdussami dan Ridwan Fakla (ed.), *Biografi 5 Rois 'Am*, hlm.173.

⁴⁰ Siddiq, *Norma-norma Pancasila*, hlm. 2.

⁴¹ A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, 1985), hlm. 407-408.

Dalam kapasitas pancasila sebagai ideologi, menurut Kiai Achmad dapat didiskusikan dengan akal dan ilmu yang sudah ada, akan tetapi jangan sekali-kali dicampuradukkan dengan agama. Dengan kata lain Pancasila yang bersifat duniawi itu jangan diagamakan, dan agama yang wahyu itu jangan dipancasilakan.⁴² Agama Islam adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran Rasul. Agama (Islam) adalah *Wacl`un Ilahiyyun*. Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, berbudaya, berdasarkan negara dan sebagainya, asal ideologi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta harus dapat menempatkan agama dan ideologi pada tempat masing-masing secara tepat.

Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan, keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus dilaksanakan bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan.⁴³ Tugas bangsa Indonesia selanjutnya adalah bagaimana memproposionalkan (*wad`in syai`in fi maqalih*) Pancasila dan agama, sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat Pancasila ini agama dapat

⁴² Noeh dan Mastuku HS (ed.), *Menghidupkan Ruh*, hlm. 123.

⁴³ Siddiq, *Hubungan Agama*, hlm. 107. Lihat juga, Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 243.

diamalkan dengan baik dan sebaliknya umat beragama menjadi tulang punggung ideologi nasional Pancasila.⁴⁴

Usaha untuk memproposionalkan agama dan Pancasila menurut Kiai Achmad, masih terdapat hambatan psikologis, yaitu kecurigaan atau kekawatiran dari dua arah. Pertama, kecurigaan bahwa negara RI ini akan menjadi negara agama tertentu yang akan merugikan bagi agama lain.

Kedua, kecurigaan bahwa Pancasila akan dijadikan semacam agama nasional yang menggantikan atau paling tidak mendangkalkan jiwa agama.⁴⁵

Munculnya kekhawatiran dan kecurigaan di atas justru dibarengi dengan munculnya pemberontakan DI-TII, Komando jihad dan lain-lain, sehingga terbentuklah mitos-mitos bahwasanya Islam itu berbahaya, Islam merupakan bahaya laten. Keadaan semacam inilah yang semakin menyeret citra Islam.⁴⁶ Melihat kondisi yang ada muncul ide Kiai Achmad untuk mengembalikan kepercayaan tentang Islam, dengan mencetuskan revolusi kebudayaan melalui media organisasi NU.

Langkah awal yang dipakai Kiai Achmad adalah ide penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Kiai Achmad menyadari sepenuhnya bahwa langkahnya akan mendapat tantangan yang berat dari dalam NU sendiri. Puncak tantangan Kiai Achmad dalam

⁴⁴ Siddiq, *Hubungan Agama*, hlm. 108.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 108-109.

⁴⁶ "Mengenal Kiai Achmad Siddiq", *Zaman* (Jakarta), 2 Februari 1985.

B. Saran-saran

Dalam menggagas sebuah pemikiran tokoh, apalagi dengan melalui studi teks, maka dibutuhkan adanya pemahaman dan ketelitian tersendiri. Untuk itu bagi siapa saja yang mempunyai idealisme, minat serta komitmen dalam bidang sejarah khususnya tentang pemikiran KH. Achmad Siddiq, alangkah baiknya penelitian selanjutnya dilakukan berdasarkan fakta dengan metode yang seobyektif mungkin yang didukung oleh sikap kritis. Selain itu masih terdapat sisi lain dari pemikiran KH. Achmad Siddiq yang masih membutuhkan bahasan lebih lanjut, misalnya dalam bidang pendidikan dan seni.

Satu hal yang menjadi catatan penyusun, bahwa penelitian ini masih merupakan karya pemula yang sudah barang tentu masih jauh dari kesempurnaan. Dengan kata lain bahwa hasil karya ilmiah ini masih perlu dikaji lebih jauh dari segala aspek.

Akhirnya, segala kritik, koreksi dan saran terhadap karya penelitian ini sangat penyusun harapkan sekali dan mudah-mudahan ada manfaatnya, *Wassalam.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- Abdussami, Humaidy dan Ridwan Fakla (ed), *Biografi Lima Rois `Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LTn-NU, 1995.
- Anshari, Endang Saefuddin, *Piagan Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Tantang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Bakar, Aboe, *Sejarah Hidup KH. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum KH. Wahid Hasyim, 1957.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Bernadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan IKIP, 1982.
- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP₃ES, 1982.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, Yogyakarta. LkiS, 1999
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan: Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Haidar, M. Ali, *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dan Politik*, Jakarta. PT. Gramedia, 1998.
- Ide, Laode, *Anatomi Konflik NU Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Iskandar, Noer Muhammad, *Menelusuri Kiai Achmad Siddiq, Dalam Munawar Fuad Noeh dan Mastuhi HS (ed.), Menghidupkan Kembali Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, Jakarta: Logos, 1999.

- Jainuri, Achmad, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Islam*, Dalam M. Din Syamsuddin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1995.
- Muallim. Amin dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Munir, Abdul dan Ahmad Arwani Banis, *Pokok-pokok Ajaran NU dan Masa Depan Umat*, Solo: Ramdhani, 1989.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga, 1992
- Mastuhu, *Tiga Ulama Termasyhur di Jawa Timur, Development Studies, Penelitian Tentang Pandangan dan Sikap Hidup Ulama Indonesia*, Jakarta: LIPI, 1987.
- Ma'sum, Saifullah (ed), *Kharisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan, 1998.
- Musawir, Nurhadi M. (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- , *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Noeh, Munawar Fuad dan Mastuhu HS (ed), *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.
- Pranarka, A.M.W, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, 1985.
- Rahmad, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.

- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.
- Raharjo, M. Dawam, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan 1993
- Rosyidi, H.M., *Hendak Dibawa Kemana Umat Ini?*, Jakarta: Media Dakwah, 1988, Cet 2.
- Siddiq, Achmad, *Khittah Nahdliyah*, Surabaya: Balai Buku, 1979.
- , *Hubungan Agama dan Pancasila*, dalam Abu Nahid (ed.), *Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, Surabaya: Yayasan Majalah Aula, 1992
- , *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, Jakarta: Lajnah Ta'liwan Nasyr PBNU, 1985.
- , *Norma-norma Pancasila Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Perpustakaan Lakpesdam, 1985.
- , *Pedoman Berfikir Nahlatul Ulama*, Surabaya: FOSSNU, 1992.
- , *Kepemimpinan NU dan Tajdid*, Disunting oleh Fahmi D Saifuddin, Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1999.
- Sitompul, Eina: Martahan, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Soebahar, Abd Halim, *Arsitektur Pemikiran Islam Indonesia: Catatan Biografi KH. Acmad Siddiq*, Buku Belum Dipublikasikan, Jember: Juli 2001.
- Subky, *Badruddin H, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1982.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Thaba, Abdul Aziz dan Afan Gaffar, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

B. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, cet. XIV.

Ridwan, Kafrawi (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoe, 1993, Jilid.4.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973.

C. Kelompok Artikel, Majalah, Jurnal dan Surat Kabar

AULA, Edisi Januari 1988 dan Februari 1991.

Jawa Pos, Edisi 24 Januari 1991

Pesantren, No. I Vol. V. 1988.

Pelita, Edisi 2 Januari 1991, 25 Januari 1991 2 Februari 1991 dan 22 Desember 1991.

Lampung Post, Edisi 1 Desember 1989.

Surya, Edisi 28 Januari 1991 dan 2 Februari 1991.

Simponi, Edisi 22 Nopember 1989.

Siddiq, Achmad, *Nuzulul Qur'an Detik Sejarah Kenabian dan Timbulnya Peradaban Baru yang Merubah Wajah Dunia*, Disampaikan pada Peringatan Nuzulul Qur'an di UNEJ, 27 Agustus 1978.

Zaman, Edisi 2 Februari 1985.



K.H. АСЪМАД ЛЮДИО

CURICULLUM VITAE

Nama : Syamsul Arifin
TTL : Jember, 15 juni 1978
Alamat : Jl. Cempaka 65 Rt.03/IV Dukuh Dempok Wuluhan Jember
Jatim 68162

Orang tua

Bapak : Abd Qodir
Ibu : Sri Martini

Pendidikan

1. TK Al-Hidayah 1983-1985
2. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 1985-1991
3. MTs-N Wuluhan Jember 1991-1994
4. MAN-1 Kaliwates Jember 1994-1997
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997-